

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DALAM UPACARA ADAT TETULAK JEBAK MASYARAKAT PRINGGABAYA

Hafiz Kurniawan¹⁾, Ayudia Sokarina²⁾
Universitas Mataram
Kurniawanhafiz814@gmail.com¹⁾, ayudia.sokarina@unram.ac.id²⁾

ABSTRACT

This study aims to interpret the accountability of fund management in the Tetulak Jebak traditional ceremony. The research was conducted in Pringgabaya Village, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara. The approach used is qualitative with an ethnographic method. Informants were deliberately selected by visiting their homes every time they returned from the mosque. The data used in this study are primary data obtained through direct interaction with the community. The results of this study indicate that in every stage of the Tetulak Jebak ceremony, which includes planning, implementation, administration, and accountability, there are values such as: kinship, deliberation, honesty, mutual cooperation, responsibility, and mutual trust. Although there is a sense of mutual trust in the management of customary funds, some educated members of the community feel that transparency in financial reporting has not been fully achieved, especially amid the demands of modernization. Some informants stated that information regarding fund management has not been evenly communicated openly to all community members. The implications of these findings highlight the importance of enhancing transparency in reporting customary ceremony funds to strengthen public trust. In addition, there needs to be a simple reporting system that is easily accessible to all residents.

Keywords: *Accountability, Fund Management, Tetulak Jebak, Traditional Ceremony, Pringgabaya Village.*

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia terkenal dengan beragam adat dan budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini (Fitri, 2022). Penelitian Fantazilu & Danial (2023) menyatakan proses terbentuknya budaya dimulai dari keyakinan yang ada pada tingkat individu, seperti nilai, ide, atau gagasan. Keyakinan ini kemudian disepakati bersama oleh anggota kelompok, sehingga menjadi keyakinan kolektif. Adat istiadat merupakan keyakinan yang diwariskan secara terus-menerus dan turun temurun kepada generasi berikutnya, untuk menjaga agar budaya tetap hidup dan berkembang (Muslim, 2024). Penelitian Borb (2024) menjelaskan bahwa tradisi dapat dipahami sebagai keseluruhan bentuk warisan, baik berupa benda material maupun gagasan, yang berasal dari masa lalu namun masih eksis hingga saat ini. Tradisi mencerminkan peninggalan yang tidak hanya tersimpan dalam ingatan kolektif, tetapi juga terus dijaga, dijalankan, dan diwariskan dari generasi ke generasi, tanpa mengalami pelupaan atau penghilangan.

Salah satu tradisi yang masih lestari adalah *Tetulak Jebak* di Desa Pringgabaya, sebuah ritual adat yang dilaksanakan sebagai ungkapan doa keselamatan dan penolak bala bagi lingkungan tempat tinggal. Tradisi ini bukan sekedar prosesi selamat, tetapi juga mencerminkan cara masyarakat menjaga harmoni dengan alam dan sesama warga melalui partisipasi kolektif. Salah satu bentuk partisipasi tersebut ialah pengumpulan dana secara sukarela

dari warga untuk memenuhi kebutuhan ritual adat ini. Praktik pengumpulan dana secara sukarela untuk mendukung hajatan adat bukanlah hal yang baru di masyarakat Nusantara. Pola gotong royong serupa dapat dijumpai dalam tradisi *Jimpitan* di sejumlah desa di Jawa, di mana warga secara rutin menyumbang sedikit beras atau uang untuk keperluan sosial bersama (Hasym & Pratama, 2014). Pola yang mirip juga terlihat pada ritual *Tolak Bala* masyarakat Dayak Desa Umin, yang melibatkan persembahan kolektif hasil ternak dan bahan sesaji sebagai wujud kebersamaan untuk memohon perlindungan, *Tolak Bala* Dayak bersifat responsif yaitu dilaksanakan saat terjadi bencana atau ada wabah (LoisChoFeer & Darmawan, 2021). Setiap bentuk partisipasi kolektif yang melibatkan pengumpulan dana atau sumber daya memerlukan pengaturan yang jelas agar kontribusi warga dapat dikelola secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian Purwohedi & Hasanah (2017) mengemukakan bahwa akuntabilitas merujuk pada kewajiban bagi pihak yang memegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, serta mengungkapkan secara jelas semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pihak yang memegang amanah harus menyajikan informasi tersebut kepada pihak pemberi amanah (*principal*), yang memiliki hak serta kewenangan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan, dengan demikian, akuntabilitas menuntut transparansi dan tanggung jawab penuh dalam setiap langkah yang diambil oleh pihak yang diberi amanah. Linda (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan kelangsungan dan eksistensi pada suatu kegiatan. Keberhasilan dalam mencapai akuntabilitas yang akurat dan transparan menjadi tolak ukur sejauh mana organisasi pelayanan masyarakat tersebut dapat dipercaya dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya.

Pengelolaan dana pada kegiatan adat umumnya masih dilakukan secara sederhana dan berbasis tradisi, proses pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan dana seringkali dilakukan secara manual atau lisan, mengandalkan kepercayaan, nilai kebersamaan, serta mekanisme sosial seperti musyawarah adat atau rapat komunitas. Meskipun belum didukung oleh teknologi canggih atau dokumen formal seperti dalam birokrasi pemerintahan, praktik ini tetap mengedepankan prinsip tanggung jawab berdasarkan norma lokal dan kearifan budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun. Penelitian Aryawati (2022) dalam pengelolaan dana adat punia dilakukan dengan cara yang sederhana namun berlandaskan nilai budaya dan spiritualitas yang kuat. Dana dikumpulkan secara sukarela dari umat, dicatat oleh pengurus adat atau pengempon pura, disimpan secara aman, dan digunakan untuk kegiatan keagamaan atau sosial yang disepakati dalam rapat adat. Meskipun pencatatan keuangan tidak selalu formal, informasi penggunaan dana disampaikan secara terbuka dalam forum komunitas, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme adat dan kepercayaan kolektif. Sejalan dengan temuan tersebut, Sriwinarti & Sokarina, (2023) juga menyoroti praktik akuntabilitas dalam pengelolaan dana piodalan, di mana setiap pengeluaran dan penerimaan dana disampaikan secara terbuka kepada umat melalui paruman atau pertemuan adat. Melalui mekanisme ini, akuntabilitas tidak hanya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan, tetapi juga melalui nilai kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi bagian dari sistem keagamaan Hindu.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyinggung akuntabilitas dalam konteks sosial dan adat. Oktavia & Mustika (2025) meneliti potret akuntabilitas dalam Desa Adat Sijunjung dan menemukan bahwa praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana masih mengandalkan pendekatan tradisional melalui musyawarah, dan belum mengadopsi sistem digital untuk meningkatkan aksesibilitas serta mempermudah pemahaman terhadap laporan keuangan. Dewi, Musimin & Lucy (2020) juga menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana *Ngusabha Nini* cenderung tidak melibatkan mekanisme pelaporan tertulis melainkan disampaikan secara verbal dalam forum rapat.

Penelitian ini bertujuan memaknai akuntabilitas pengelolaan dana pada upacara adat *Tetulak Jebak* masyarakat Pringgabaya. Upacara *Tetulak Jebak* merupakan upacara khas suku sasak di Desa Pringgabaya yang dilaksanakan untuk menghindarkan diri dari bala dan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur. Dananya bersumber dari sumbangan sukarela warga yang

dikumpulkan dan dikelola kolektif. Keunikan Tetulak Jebak terletak pada perpaduan nilai Islam dan adat lokal yang menyatukan doa, sedekah, dan kebersamaan dalam satu rangkaian prosesi, di mana setiap tahapannya berfungsi mempererat solidaritas, menanamkan tanggung jawab sosial, serta memperkuat identitas budaya masyarakat.

2. KAJIAN LITERATUR

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah tanggung jawab bagi para pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan kesesuaian antara pengeluaran dana dengan tercapainya nilai-nilai dan tujuan dalam suatu upacara adat (Fiandi, 2023). Ahyaruddin & Faculty (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya sebatas pada pelaporan, melainkan juga menyangkut aspek integritas, keterlibatan public, dan kepatuhan terhadap norma dan regulasi yang berlaku, akuntabilitas yang baik akan membangun kepercayaan publik, memperkuat legitimasi organisasi, serta meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengelolaan sumber daya. Akuntabilitas adalah kewajiban seorang pemegang Amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, serta menyampaikan dan mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi Amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Meskipun akuntabilitas secara umum dipahami sebagai kewajiban untuk menjelaskan tindakan kepada publik (Bovens, 2007). Dalam konteks masyarakat adat, Ellwood (1993) menjelaskan bahwa konsep ini lebih bersifat sosial dan kultural, di mana kepercayaan, partisipasi komunitas, serta kearifan lokal menjadi dasar utama dalam praktik pertanggungjawaban.

Rashdi, Dick & Martin (2015) mengungkapkan bahwa, terdapat empat faktor utama yang sangat penting dalam membentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, yaitu *responsibility* (tanggung jawab), *assurance* (jaminan), *transparency* (keterbukaan), dan *remediation* (pemulihan). *Responsibility* merujuk pada kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan dan penggunaan dana, *assurance* memastikan adanya mekanisme verifikasi agar proses dapat dipercaya; *transparency* berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan; sementara *remediation* menyediakan prosedur untuk memperbaiki kesalahan serta mempertanggungjawabkannya kepada publik. Keempat elemen ini saling terkait dan menjadi dasar bagi organisasi agar dapat dikelola secara terbuka, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Gamaliel (2025) yang juga mencerminkan empat elemen penting dalam akuntabilitas dan transparansi, yaitu *responsibility*, *assurance*, *transparency*, dan *remediation*. Tanggung jawab diwujudkan melalui pembagian peran dan wewenang yang jelas dalam pengelolaan dana, jaminan diberikan lewat sistem pelaporan yang tertib dan terdokumentasi, transparansi terlihat dari keterbukaan informasi kepada pihak terkait seperti pengurus dan donatur, serta perbaikan dilakukan secara langsung bila terjadi kesalahan dalam pencatatan atau pelaksanaan kegiatan.

Pengelolaan Dana dalam Kegiatan Adat

Pengelolaan dana untuk kegiatan adat, seperti pada upacara adat *Tetulak Jebak*, mencerminkan sistem ekonomi kolektif, dimana partisipasi dan saling percaya antara panitia dan masyarakat menjadi landasan dari pertanggungjawaban. Penelitian Sujana (2020) mengenai pengelolaan dana adat *Ari-Ari* di Bali menunjukkan bahwa akuntabilitas tetap terjaga walaupun tidak ada sistem pelaporan formal seperti yang ada di lembaga pemerintahan. Hal ini didukung oleh norma-norma tradisional dan peran oleh tokoh adat yang menjaga integritas dalam proses pengelolaan keuangan komunitas. Walaupun masyarakat adat tidak menerapkan sistem akuntansi yang umum, mereka tetap memiliki cara transparan dan mekanisme pertanggungjawaban yang berfungsi dengan baik untuk menjaga kepercayaan dan keberlangsungan kegiatan adat (Pahlevi et al., 2022). Beberapa penelitian yang telah ada juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana untuk upacara adat dilakukan dengan cara yang terbuka, melibatkan masyarakat dalam pengumpulan dan pengeluaran dana. Contohnya, dalam studi di desa adat Cau, Kumalawati & Atmadja (2020) menjelaskan proses pelaporan dilakukan melalui musyawarah desa adat, di mana

setiap pengeluaran dijelaskan kepada seluruh anggota masyarakat. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak selalu harus dalam bentuk laporan tertulis atau audit, tetapi juga dapat terwujud dalam bentuk partisipatif yang kuat dalam struktur sosial masyarakat. Contoh lain dalam penelitian Indaryani & Sokarina (2024) pengelolaan dana seperti uang *Panai* yang dikelola oleh pihak perempuan dan dilakukan secara kolektif serta diawasi oleh perwakilan keluarga bahkan tidak jarang pihak Perempuan akan menambahkan jika terdapat kekurangan biaya, mekanisme ini menjaga kepercayaan dan menghindari konflik dalam pengelolaan dana tersebut. Praktik pengelolaan keuangan adat umumnya melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dalam studi mereka terhadap kegiatan *Piodalan* di Pura Khayangan Tiga, ditemukan bahwa ketiga tahapan tersebut telah dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak menggunakan standar akuntansi modern, masyarakat adat tetap memiliki mekanisme internal yang efektif dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana secara terbuka kepada krama adat (Andriani & Atmaja, 2022). Skema serupa juga ditemukan pada penelitian Brahmanda (2024) dalam upacara *Ngaben*, di mana perencanaan, pelaporan sederhana, serta pengumuman dana dilakukan secara adat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Selama proses penelitian, peneliti terlibat secara langsung dan mengikuti seluruh rangkaian prosesi adat *Tetulak Jebak* dari awal hingga akhir, sambil wawancara secara mendalam. Melalui pengalaman interaksi secara langsung dengan masyarakat, peneliti mendapat banyak informasi dan memahami setiap makna yang terkandung di dalam setiap prosesinya. Posisi peneliti sebagai bagian dari masyarakat Pringgabaya, yang sejak kecil terbiasa mengikuti upacara *Tetulak Jebak*, semakin memudahkan dalam menjalin kedekatan dan kepercayaan dengan para informan. Selama pencarian data, peneliti berbincang dan menggali informasi dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan upacara adat ini, mulai dari ketua panitia penyelenggara, bendahara, ketua Dusun Puncangsari, hingga beberapa tokoh masyarakat yang dianggap memahami nilai-nilai yang melekat dalam tradisi ini. Objek penelitian ini adalah praktik dan makna akuntabilitas dalam pengelolaan dana pada upacara adat *Tetulak Jebak* masyarakat Pringgabaya.

Penelitian ini, dilaksanakan di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Fokus utama peneliti pada data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan. Proses wawancara dilakukan secara bertahap, satu per satu, dengan mendatangi rumah informan setiap pulang dari masjid. Momen ini dipilih karena terasa lebih santai dan akrab, sehingga suasana wawancara menjadi lebih cair dan terbuka. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja, dengan pertimbangan tertentu agar benar-benar mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam. Setiap data yang terkumpul dicatat dalam buku kecil, dan untuk memperkuat data tersebut peneliti merekam pembicaraan menggunakan handphone. Analisis data menggunakan analisis domain untuk menemukan kategori utama terkait akuntabilitas dana pada upacara adat *Tetulak Jebak*, seperti sumber dana, pengelolaan dana, transparansi dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, analisis taksonomi merinci setiap kategori ke dalam sub kategori yang lebih spesifik. Teknik ini membantu menyusun data secara sistematis serta memudahkan peneliti menafsirkan makna akuntabilitas dana adat di Desa Pringgabaya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adat istiadat merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan budaya yang Adat istiadat merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun di dalam sebuah kelompok. Sebagai kumpulan aturan, norma, dan nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, adat istiadat berperan penting sebagai panduan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam interaksi sosial yang lebih luas. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sering kali mencerminkan kearifan lokal dan cara hidup bermasyarakat (Turyani & Erni, 2024). Indonesia, negara yang terkenal dengan keragaman etnis dan budaya, adat istiadat memiliki kedudukan yang sangat penting. Selain menjadi identitas

yang membedakan setiap kelompok masyarakat, adat istiadat juga memainkan peran besar dalam membentuk karakter dan moralitas masyarakat Indonesia. Berbagai ritual, tradisi, dan kebiasaan yang ada dalam adat istiadat tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Desa Pringgabaya merupakan desa yang terletak di Kabupaten Lombok Timur yang masih menjunjung tinggi adat dan tradisi hingga saat ini, adat-adat di desa ini sangatlah beragam dan memiliki maknanya sendiri. Sejarah Desa Pringgabaya yang dahulunya merupakan sebuah hutan yang tidak berpenghuni, dan dikenal dengan daerah yang berbahaya karena masih melekat dengan hal-hal yang berbau mistis atau banyak dihuni makhluk gaib (Widya & Syarifuddin, 2022). Oleh karena itu masyarakat meyakini bahwa apabila membuka lahan untuk membangun sebuah rumah atau perkampungan di daerah tersebut, harus ada ritual-ritual khusus yang menyertai agar terhindar dari bahaya dan penyakit atau sering disebut dengan Tolak Bala, ritual-ritual khusus tersebut dikenal oleh masyarakat dengan nama adat *Tetulak Jebak*.

Untuk kelancaran upacara adat *Tetulak Jebak*, Desa Pringgabaya dalam pengelolaan dana melakukan beberapa tahap penting, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tahap Perencanaan

Langkah awal yang dilakukan adalah mengadakan musyawarah bersama masyarakat umum dan tokoh-tokoh penting di setiap dusun, antara lain Kepala Dusun, RT, RW dan tokoh penting lainnya.

Bapak Hairul Azmi menjelaskan jauh hari sebelum upacara adat, kurang lebih sekitar 1 bulan, Ketua Dusun di setiap dusun ditugaskan untuk mengumumkan melalui toa di setiap masjid, untuk ketersediaan atau kehadiran para tokoh masyarakat dan juga masyarakat umum untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu terkait upacara adat ini, bunyi pengumuman tersebut.

“Assalamu’alaikum untuk bapak-bapak, kanca ibuk-ibuk tiang umumin lek jelo si jemak niki, ta gin ngadayang rapat lek kantor desa terkait acaranta si jemak yaitu adat Tetulak dese atau tetulak jebak, jari blek harapan tiang bapak ibuk bau hadir lek rapat sijemak, jam 8 pagi di wah pada lek tono”

“Assalamu’alaikum untuk bapak-bapak dan ibu-ibu saya umumkan bahwa besok pagi sekitar jam 8, kita akan melaksanakan rapat terkait acara adat *Tetulak Jebak*. Jadi besar harapan saya atas kehadiran bapak dan ibu sekalian”

Musyawarah ini bertujuan untuk bertukar pendapat dan pikiran, supaya upacara adat ini bisa berjalan dengan lancar. Menurutnya musyawarah ini dilakukan sebagai bentuk partisipatif dan demokratis dalam menentukan arah kegiatan adat *Tetulak Jebak* yang akan dilaksanakan, memberikan kesempatan kepada perwakilan setiap dusun untuk menyampaikan saran demi kelancaran dan kenyamanan masing masing setiap dusun. Bapak Hairul Azmi melanjutkan narasinya dengan berkata,

“Tapi sedikit sekali masyarakat umum yang datang, mungkin karena sibuk kerja karena kebanyakan masyarakat kita profesinya petani jadi sibuk mengurus sawah, yang datang biasanya pemuda dan tokoh-tokoh dusun”.

Demikian pula yang disampaikan Bapak Hamdan masyarakat itu jarang sekali hadir di forum rapat adat karena sebagian besar waktunya habis untuk bekerja, apalagi mayoritas di sini petani yang pagi sampai sore sibuk di sawah, jadi ketika ada undangan rapat biasanya mereka tidak bisa meluangkan waktu, bukan karena tidak peduli dengan adat, tapi lebih karena tuntutan pekerjaan sehari-hari yang tidak bisa ditinggalkan.

Bapak Hairul Azmi mengungkapkan bahwa dalam musyawarah tersebut, diperoleh kesepakatan membentuk sebuah kepanitiaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara adat *Tetulak Jebak*. Panitia dibentuk berdasarkan prinsip keterwakilan dan kesukarelaan dari anggota masyarakat, keterlibatan panitia ini sangat penting untuk mengkoordinasikan berbagai aspek dalam kegiatan upacara adat ini, dimulai dari penggalangan dana, pembagian tugas hingga pelaporan hasil kegiatan. Panitia ini nantinya yang akan bertugas untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dari hasil musyawarah, disusun

struktur kepanitiaan yang terdiri dari ketua panitia, sekretaris, bendahara, seksi acara, seksi konsumsi, seksi perlengkapan, serta seksi keamanan dan kebersihan. Pembagian tugas ini dilakukan secara terbuka dan partisipatif, sehingga setiap warga merasa memiliki peran dalam kelancaran upacara. Selain pembentukan panitia hasil dari musyawarah tersebut juga akan dilakukan *pemupuan* dana atau meminta sumbangan kepada masyarakat.

Pemupuan dilakukan satu minggu sebelum pelaksanaan upacara adat *Tetulak Jebak*, yang bertugas yaitu Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang sudah ditempatkan di 20 dusun yang ada di Desa Pringgabaya, sumbangan tersebut digunakan sebagai sumber dana utama dalam pelaksanaan adat *Tetulak Jebak* (Bapak Hamdan).

Berikut tabel data sumbangan sesuai yang disebutkan Bapak Hamdan yang wajib dikeluarkan per dusun.

Tabel 1 Data Sumbangan

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Uang Tunai	1	Lembar	100,000	100,000
2	Beras	20	Kg	12,000	240,000
3	Beras Ketan	5	Kg	20,000	100,000
4	Kayu Bakar	3	Ikut	5,000	15,000
5	Janur Kelapa	4	Ikut	20,000	80,000
6	Telur	1	Tray	60,000	60,000
7	Kelapa	10	Buah	10,000	100,000
8	Minyak Goreng	3	Liter	18,000	54,000
9	Ayam	5	Ekor	50,000	250,000
TOTAL					999,000

Sumber: Kantor Kepala Desa dan Pasar Pringgabaya

Tabel tersebut memuat rincian jenis sumbangan yang dikeluarkan per dusun, setiap sumbangan dicatat berdasarkan jumlah, satuan dan harga per satuan. Penetapan harga satuan pada masing-masing barang mengacu pada harga standar yang berlaku di pasar Pringgabaya. Setelah dihitung, jumlah sumbangan yang harus dikeluarkan setiap dusun yang ada di desa Pringgabaya sebesar Rp999.000.

Setelah menjelaskan sumbangan yang dikeluarkan setiap dusun, Bapak Hamdan tiba-tiba diam lalu memukul pelan dahinya, seraya mengingat sesuatu kemudian menjelaskan dengan berbinar-binar,

“Iya lupa selain dari masyarakat, Pekasih atau yang mengurus irigasi dan Pemerintah Desa juga diwajibkan untuk menyumbangkan beberapa bahan makanan dan uang tunai sebesar Rp500.000.”

Beliau menerangkan sumbangan yang sudah terkumpul dipergunakan untuk upacara utama sebagai pembuka yang berlangsung di Kantor kepala Desa Pringgabaya. Setelah acara utama selesai, langsung serentak diselenggarakan di setiap gang-gang dusun Desa Pringgabaya.

Nilai musyawarah terlihat jelas ketika tokoh adat, ketua dusun, RT/RW, serta perwakilan masyarakat berkumpul untuk membicarakan hal-hal teknis pelaksanaan upacara. Walaupun kehadiran masyarakat umum terbatas karena kesibukan bekerja, proses pengambilan keputusan tetap dilakukan secara partisipatif. Musyawarah ini menunjukkan bentuk demokrasi lokal yang menjunjung tinggi kebersamaan, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima secara kolektif.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan menjadi momen untuk mengonfirmasi temuan awal serta memperdalam pemahaman terhadap nilai-nilai, simbol, dan praktik yang hidup dalam masyarakat adat tersebut.

Bapak Hamdan Ketua Dusun Puncangsari menjelaskan bahwa adat *Tetulak Jebak* dimulai pada hari rabu, awal bulan muharam, biasanya sebelum pelaksanaan akan saya umumkan melalui toa masjid untuk memberitahukan masyarakat bahwa besok dihari rabu akan dilaksanakan upacara adat *Tetulak Jebak*.

Satu hari sebelum pelaksanaan upacara adat tersebut, setelah mendengar pengumuman dari Ketua Dusun semua masyarakat bergotong royong pergi ke kebun untuk mencari bambu dan janur kelapa untuk persiapan menanam sesawek, dan ibu-ibu menyiapkan makanan untuk acara di malam harinya, kemudian pada sore harinya di setiap pojok gang-gang dipasangkan *sesawek*¹ lalu di sekitar tempat tersebut masyarakat menyembelih satu ekor ayam yang kemudian darahnya di teteskan di sekitar tempat itu, lalu pada malam hari sekitar jam 8 ba'da Isya ibu-ibu berbondong-bondong membawa dulang yang ditutup *tembolak*² ke masjid untuk acara pengajian dan dzikir (Bapak Ani).

Bapak Muhdan menjelaskan bahwa maksud dipasangkannya sesawek dan menyembelih satu ekor ayam bertujuan untuk memberitahu makhluk gaib yang menghuni tempat tersebut bahwa akan dibangun sebuah rumah, jadi mereka tidak akan merasa diganggu dan tidak akan mengganggu orang yang membuat rumah”.

Upacara adat *Tetulak Jebak* berlangsung selama tiga hari berturut-turut dengan menu yang berbeda-beda. Pada hari pertama, menu utama yang disajikan adalah bubur merah dan bubur putih, yang terbuat dari beras yang dikuahi dengan santan. Makna dari bubur merah dan putih ini melambangkan kehidupan baru serta berfungsi sebagai simbol untuk menolak bala, dengan harapan dapat menghindarkan manusia dari kesialan dan segala bentuk keburukan. Pada hari kedua menunya Apem (menyimbolkan Perempuan), kasong/cerorot (menyimbolkan Laki laki) dan serabi. Hari terakhir disediakan Ketupat lengkap dengan opor ayam dan ayam bakar (Bapak Muhdan).

Untuk hidangannya sebagian besar berasal dari niat tulus masyarakat yang ingin mengeluarkan sebagian rezekinya. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Muhdan dalam kutipan wawancara sebagai berikut,

“Jari pesajik ino, dengan si wah beniat nyugulang ye, ngadu kepeng pribadi, laguk kadang arak rombokna ekan panitia melalui RT tiap dusun lamunna kepeng sumbangan sirubin masi sisa”

“Jadi hidangan ini dikeluarkan oleh masyarakat itu sendiri menggunakan uang pribadi, tapi juga biasanya ditambah oleh panitia melalui perwakilan RT di setiap dusun, jika dana pada upacara pembuka masih ada sisa”.

Makanan khas Bakalan tidak hanya sebagai sajian biasa, tetapi juga sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan dan tujuan, seperti kesetiaan, bahagia, dan penghormatan (Mijianti & Dewi, 2022). Hidangan pada adat *Tetulak Jebak* juga bukan semata-mata disajikan untuk sekadar mengenyangkan perut. Setiap sajian memiliki makna yang mendalam, mewakili harapan, doa, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Seperti contohnya bubur merah dan bubur putih yang mengandung harapan dapat menghindarkan manusia dari keburukan. Masyarakat masih mempercayai bahwa makanan-makanan ini adalah bagian dari wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus sebagai media penghubung antara manusia dengan alam, leluhur, dan sesama yang hingga kini tetap dijaga dan dihormati sebagai bagian dari identitas budaya yang tak ternilai.

Pada hari pelaksanaan, dari siang ibu-ibu sudah mulai sibuk menyiapkan makanan untuk persiapan acara *Tetulak Jebak* yang akan dilaksanakan pada sore hari, terlihat anak-anak yang bermain sambil membantu ibunya menyiapkan makanan,

Ibu RT menjelaskan, dana yang digunakan untuk menyiapkan hidangan, berasal dari sisa dana acara kemarin yang diserahkan kepada RT di setiap dusun, jadi beliau menyiapkan hidangan lebih yaitu dua atau tiga dulang, untuk masyarakat yang lain tidak diwajibkan, tapi masyarakat yang memiliki hajat atau yang sekedar ikut memeriahkan upacara adat juga ikut menyiapkan hidangan.

Untuk hari pertama kita menyiapkan bubur merah dan bubur putih serta makanan-makanan pelengkap lainnya, kalau besok kita siapin cerorot dan apem (Ibu RT).

¹ Sesawek yaitu Sebuah tiang bambu panjang yang di atas atau ujungnya dihias dengan ketupat atau anyaman janur (daun kelapa muda)

² Tembolak merupakan tudung saji yang dibuat dari daun lontar dan biasanya berwarna merah.

Sore hari terlihat ibu-ibu membawa dulang di atas kepala mereka, sementara anak-anak berlarian sambil tertawa riang menuju tempat dilaksanakannya upacara. Di sisi lain, bapak-bapak dan para pemuda turut membantu mempersiapkan tempat serta perlengkapan yang dibutuhkan agar acara berjalan lancar. Pada lokasi upacara, suasana semakin ramai dengan kehadiran ibu-ibu dan anak-anak yang sudah menunggu dimulainya prosesi adat, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Upacara Adat Tetulak Jebak

Antusias ibu-ibu dan anak-anak sangat terlihat, mereka tidak sabar untuk secepatnya upacara dimulai terlihat dari wajah-wajah mereka yang penuh semangat dan keceriaan, ibu-ibu dengan sabar menunggu sambil berbincang satu sama lain, seolah suasana itu menjadi momen kebersamaan yang sangat mereka nantikan. Upacara dimulai dengan pembukaan dari Mamik Yon yang menjelaskan kepada anak-anak bahwa upacara adat ini dilakukan agar kita terhindar dari balak atau penyakit dan hidup sejahtera.

Upacara adat tersebut lebih mengarah ke acara selamatan atau dzikiran, uniknya upacara ini, sebelum makan makanan yang dihidangkan, warga melemparkan beras yang digoreng, gula merah dan kelapa yang dipotong kecil-kecil.

Mamik Yon menjelaskan kebiasaan tersebut sebagai simbol penolak bala dan energi negatif, seperti mengusir roh-roh jahat dari lingkungan kita, supaya masyarakat merasa lebih tenang dan terlindungi. Tradisi ini sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur, sehingga bukan hanya dianggap sebagai ritual biasa, tetapi juga diyakini memiliki kekuatan spiritual untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan hal-hal gaib di sekitar kita. Dengan adanya simbol tersebut, diharapkan segala bentuk marabahaya dapat dijauhkan, dan suasana kampung menjadi lebih aman, tenteram, serta penuh berkah.

Kebahagiaan anak-anak dalam upacara tersebut secara tidak langsung menunjukkan adanya proses internalisasi nilai budaya sejak dini. Kehadiran mereka dalam suasana sakral upacara bukan sekadar menghadiri peristiwa adat, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran sosial di mana anak-anak mulai mengenal simbol, makna, serta tata cara yang diwariskan oleh leluhur. Keterlibatan emosional yang tampak dari ekspresi kebahagiaan mereka mengindikasikan bahwa tradisi ini berfungsi sebagai media pewarisan nilai, di mana rasa kebersamaan, penghormatan terhadap adat, dan identitas budaya ditanamkan secara alami melalui pengalaman langsung.

Keterlibatan peneliti dalam upacara *Tetulak Jebak* membentuk pengalaman yang sarat dengan kebersamaan, di mana setiap rangkaian prosesi menghadirkan rasa kedekatan, keakraban, dan solidaritas antarwarga. Momen tersebut berfungsi sebagai ruang penguatan rasa memiliki satu sama lain serta menghadirkan perasaan aman. Setiap doa, makanan, dan simbol adat membawa kesan emosional yang mendalam, menyatukan nilai kebersamaan, dan kehidupan sehari-hari. Nuansa hangat yang tercipta dalam tradisi ini memperkuat identitas kolektif masyarakat serta menanamkan perasaan bangga, tenteram, dan menyatu dengan lingkungan sosial.

Upacara diakhiri dengan pemberian selawat kepada anak-anak kecil, pemberian *selawat*³ (uang) ini adalah simbol kerendahan hati dan kepedulian, memberi pelajaran bagi anak-anak untuk senantiasa selalu bersedekah ketika mendapat rezeki lebih, sebagaimana terlihat pada gambar 2.



Gambar 2. Pembagian Selawat

Setelah semua orang sudah meninggalkan tempat duduk, terlihat Pak RT memasukan sesuatu ke dalam anyaman ketupat, Pak RT menjelaskan,

“Ine aku nemang bubur kanca penguinang,”

“Ini saya lagi memasukkan bubur hidangan yang tadi dan penguinang atau campuran pinang, daun sirih dan kapur”

Menurut penjelasan Pak RT, tradisi memasukkan bubur dan penguinang ke dalam anyaman ketupat merupakan bentuk penghormatan kepada makhluk-makhluk gaib serta para leluhur yang diyakini memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual masyarakat. Masyarakat percaya bahwa melalui persembahan ini, mereka dapat menjaga keharmonisan antara manusia dan roh leluhur, sekaligus menghindarkan diri dari gangguan yang tidak diinginkan.

Kerja sama masyarakat dalam rangkaian upacara adat Tetulak Jebak bukan sekadar memenuhi kewajiban adat, melainkan menjadi simbol nyata bahwa gotong royong di desa ini tidak hanya terbatas pada aktivitas fisik, tetapi juga menyatukan hati dan niat dalam ritual adat. Nilai gotong royong yang terjalin tampak paling menonjol pada tahap pelaksanaan, di mana warga secara sukarela bahu-membahu menyiapkan perlengkapan upacara, memasang sesawek, hingga menyembelih ayam sebagai bagian dari ritual. Ibu-ibu dengan penuh semangat menyiapkan hidangan, sementara bapak-bapak membantu mendirikan perlengkapan acara. Bentuk kerja sama ini bukan hanya aktivitas fisik semata, tetapi juga perwujudan kebersamaan spiritual yang menegaskan bahwa pelaksanaan upacara adat tidak bisa berdiri sendiri, melainkan membutuhkan kontribusi semua pihak. Dengan demikian, gotong royong menjadi simbol kuat bahwa semangat kebersamaan, saling melengkapi, dan rasa memiliki dapat tumbuh melalui kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan sosial dan budaya.

Nilai kekeluargaan juga terlihat jelas dalam interaksi antarwarga selama persiapan maupun pelaksanaan upacara. Meskipun mereka tidak terikat hubungan darah, rasa peduli, saling mendukung, dan kebersamaan tetap terjalin. Anak-anak, pemuda, dan orang tua bekerja bersama sesuai peran masing-masing. Situasi ini memperlihatkan bahwa kekeluargaan dalam masyarakat adat bukan semata hubungan biologis, tetapi ikatan sosial yang dibangun dari rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Kekeluargaan inilah yang memperkuat kohesi sosial dan menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi.

Tahap Penatausahaan

Penatausahaan memegang peran penting sebagai jembatan antara proses perencanaan dan pelaporan. Penatausahaan merupakan aktivitas administratif yang bersifat sistematis, yang

³ Selawat yaitu pembagian uang kepada anak-anak.

mencakup pencatatan, pembukuan, dan pengarsipan seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan penggunaan dana. Penatausahaan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian internal, tetapi juga sebagai bukti akuntabilitas dan transparansi terhadap alokasi dan realisasi dana. Oleh karena itu, tahapan ini menjadi fokus penting dalam mengkaji sejauh mana tata kelola dana pada upacara adat *Tetulak Jebak*.

Bapak Haji Hasbullah menjelaskan untuk penatausahaan dana pada adat *Tetulak Jebak* sudah bersifat sistematis dengan bantuan komputer melalui aplikasi Microsoft Office Excel, aplikasi ini digunakan untuk mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran dana secara terperinci. Data yang dimasukkan mencakup sumbangan dari setiap dusun, pekasih dan Pemerintah Daerah (PEMDA). Penggunaan Excel ini sangat membantu dalam mempermudah proses pencatatan dan pembuatan laporan keuangan yang lebih terstruktur dan dapat dengan mudah diakses oleh pihak terkait jika dibutuhkan. Bapak Haji Hasbullah menerangkan,

“Kalau untuk mengelola dana adat cukup Microsoft Office Excel aja dan nanti untuk penyampaian laporannya melalui rapat atau musyawarah dengan masyarakat”

Meskipun demikian, dalam konteks kegiatan yang berskala lokal dan dana yang relatif tidak terlalu besar, sistem ini masih berjalan dengan lancar. Saya melihat bahwa aspek kepercayaan dan keterbukaan menjadi penguat utama di balik sistem pencatatan yang sederhana ini.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Laporan keuangan yang dibuat tidak menggunakan format resmi atau baku seperti laporan keuangan lembaga pada umumnya. Laporan lebih bersifat sederhana, berupa rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran, serta sisa dana, yang biasanya disusun dalam lembar Excel yang sama dengan catatan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dilakukan secara langsung dan terbuka di hadapan masyarakat atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan. Laporan dibacakan dalam pertemuan rapat atau diumumkan secara lisan. Jika terdapat sisa dana, biasanya disebutkan dengan jelas dan dipergunakan untuk tambahan biaya *Tetulak Jebak* yang diselenggarakan di setiap gang, amanat tersebut biasanya diberikan kepada RT dan RW.

Pelaporan keuangan melalui rapat yang melibatkan tokoh masyarakat dan warga secara langsung dapat mendukung transparansi dan membangun kepercayaan dalam pengelolaan dana adat (Syahril, 2019). Seperti yang disampaikan Bapak Hairul Azmi yang menjelaskan bahwa untuk pelaporan dan pertanggungjawaban dana upacara adat tersebut disampaikan ketika acara rapat, dimana panitia akan menyampaikan detail untuk setiap pemasukan dan pengeluaran dana, acara rapat ini dihadiri oleh Ketua Dusun, RT, RW dan pemuka desa lainnya termasuk sebagian masyarakat umum. Beliau melanjutkan narasinya,

“Rapat ini terbuka, kita tidak pernah melarang siapapun untuk berpartisipasi, mau dari desa lain juga boleh ikut, karena rapat ini menurut saya sangat penting, supaya masyarakat juga bisa mengkritik dan memberi saran, dan juga kami sebagai panitia bisa memperbaiki Ketika ada kekurangan atau mungkin ada hal yang mengurangi kepercayaan masyarakat kepada kami”.

Terkait acara rapat Mbak Lia yang merupakan Kader di dusun Puncangsari menjelaskan dalam rapat tersebut memang betul dihadiri oleh masyarakat umum, karena memang tidak ada batasan atau larangan bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi dalam rapat tersebut.

Nilai kejujuran tercermin dalam pengelolaan dana upacara adat *Tetulak Jebak*. Panitia selalu menekankan pentingnya mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran disertai dengan bukti nota atau kwitansi yang sah. Keterbukaan menyampaikan informasi pada rapat desa memperlihatkan sikap jujur dari panitia kepada masyarakat. Kejujuran ini menjadi modal sosial yang menjaga kepercayaan, karena masyarakat merasa bahwa dana yang disumbangkan tidak disalahgunakan. Seperti yang disampaikan beberapa informan, mereka tetap percaya kepada panitia karena selama ini tidak pernah ada indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana adat. Dengan demikian, kejujuran bukan hanya nilai personal, tetapi juga bagian dari komitmen kolektif yang memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana adat.

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban terlihat jelas nilai musyawarah dari cara panitia menyampaikan laporan keuangan dalam forum terbuka yang dihadiri tokoh adat, ketua dusun, RT/RW, dan masyarakat umum. Pertemuan ini bukan hanya sekadar ajang membaca rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga menjadi ruang dialog dua arah antara panitia dan masyarakat. Dalam forum tersebut, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, memberikan kritik, maupun menyampaikan saran terkait pengelolaan dana. Bahkan, masyarakat dari luar dusun pun tidak dilarang hadir, yang menandakan keterbukaan serta penghargaan terhadap prinsip musyawarah.

Penerapan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Adat Tetulak

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana adat *Tetulak Jebak* sangat penting untuk ditinjau, karena tidak hanya memastikan penggunaan dana yang transparan dan efisien, tetapi juga mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya yang dapat merugikan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan upacara adat. Akuntabilitas menjadi landasan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang dijunjung dalam tradisi adat, serta memberikan jaminan bahwa seluruh pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan peran dan tanggung jawabnya, dengan demikian, pengelolaan dana yang akuntabel akan mendukung kelancaran upacara adat, memperkuat hubungan sosial dan menjaga kelestarian adat istiadat.

Berdasarkan informasi yang diberikan Bapak Haji Hasbullah selaku Bendahara adat *Tetulak Jebak*, transparansi pengelolaan dana pada upacara adat ini sudah dilakukan dengan baik, seluruh pengeluaran dicatat secara tertulis dilengkapi dengan bukti nota atau kwitansi, dan dilaporkan secara terbuka dalam forum rapat. Pernyataan tersebut sudah mencerminkan keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan dana upacara adat. Hal ini bertentangan dengan yang disampaikan oleh Bapak Muhdan,

“Lamun kepeng sumbangan ino dekta taok kaduna beli apa doang, soalne deknawah arak badak ite, ite cuman nenaok acara lek kantor desa gakne, laguk wah sadukta so panitia wah, soalne ite endah milu nikmatin ye acara ino”.

“Kalau uang sumbangan, kita tidak tahu dipergunakan untuk apa saja, karena tidak pernah diberi tahu, yang kita tahu hanya ikut menyumbang untuk keperluan upacara adat, namun kita sudah percaya kepada pihak panitia karena kita juga yang ikut menikmati acara tersebut”

Pernyataan tersebut semakin diperkuat oleh Bapak Ani dan Ibu Masrah Aeni, Keduanya menegaskan bahwa selama ini mereka sama sekali tidak pernah menerima informasi yang jelas mengenai alokasi dan penggunaan dana yang telah disumbangkan oleh masyarakat.

Walaupun saling percaya, tapi kalau bisa disampaikan, lebih baik disampaikan secara merata, sekarang zamannya sudah beda, mungkin kakek-kakek, nenek-nenek dan masyarakat biasa tidak mempermasalahkannya itu, tapi berbeda dengan sebagian masyarakat yang sudah mengerti terkait pentingnya akuntabilitas dan transparansi (Ibu Syerkan)

Seiring dengan masuknya pengaruh modernisasi dan semakin banyaknya masyarakat yang berpendidikan, muncul harapan baru terhadap cara pengelolaan dana. Masyarakat sekarang tidak hanya ingin tahu bahwa dana digunakan dengan baik, tetapi juga ingin melihat bukti yang jelas dan terbuka. Oleh karena itu, transparansi mulai dianggap penting, misalnya dalam bentuk pencatatan keuangan, laporan kegiatan, atau penyampaian informasi secara terbuka kepada warga. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas adat mulai bergeser dengan tetap menjaga nilai tradisional seperti gotong royong, tapi juga mulai menggabungkan prinsip-prinsip modern agar lebih dipercaya oleh semua pihak.

Transparansi pengelolaan dana pada upacara adat *Tetulak Jebak* belum sepenuhnya tercapai, karena tidak meratanya informasi kepada seluruh masyarakat, menurut pendapat Bapak Hairul azmi, ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang berhalangan hadir ketika rapat dilaksanakan.

Nantikan bisa informasinya tersebar melalui masyarakat yang hadir, yang dibicarakan dari mulut ke mulut (Bapak Hairul Azmi)

Sebagian masyarakat yang lain berpendapat bahwa tidak merasa keberatan terkait cara panitia dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban, karena bagi mereka yang terpenting adalah adanya kejelasan bahwa dana yang digunakan benar-benar dialokasikan untuk keperluan upacara. Mereka menilai bahwa selama proses pelaporan dilakukan secara terbuka di hadapan tokoh adat dan disaksikan oleh masyarakat, hal tersebut sudah cukup menjadi bentuk transparansi. Bahkan, ada sebagian masyarakat yang menganggap detail teknis penyampaian laporan tidak terlalu penting, asalkan esensi dari pertanggungjawaban tetap tersampaikan dan tidak menimbulkan kecurigaan di antara warga.

Disampaikan bagus, tidak disampaikan juga tidak apa-apa karena ini kan sumbangan sifatnya sukarela tidak ada pemaksaan, jadi serahkan sudah semuanya kepada panitia yang mengatur (Ibu Murhan).

Nilai-nilai akuntabilitas pada dasarnya telah tercermin dan diwakili melalui berbagai praktik sosial yang hadir dalam setiap tahapan kegiatan adat, seperti musyawarah, gotong royong, kekeluargaan, kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengatur bagaimana dana dikumpulkan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan. Dalam konteks masyarakat adat, keberadaan nilai tersebut sudah cukup untuk menjamin keberlangsungan tradisi sekaligus menjaga legitimasi panitia di mata warga. Namun, jika ditinjau dari sudut pandang akuntabilitas modern yang menekankan pada sistem pelaporan tertulis, standar administratif, dan dokumentasi formal, praktik pengelolaan dana adat *Tetulak Jebak* memang belum sepenuhnya memenuhi kriteria tersebut. Meskipun demikian, mekanisme yang ada sejauh ini tetap berjalan dengan efektif, sebab informasi mengenai penggunaan dana telah disampaikan secara terbuka dalam rapat adat, bahkan bisa saja dilanjutkan secara informal melalui komunikasi lisan dari mulut ke mulut. Pola komunikasi tradisional ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat rasa kebersamaan, karena masyarakat memperoleh penjelasan langsung dalam forum atau melalui interaksi sehari-hari. Dengan demikian, meskipun belum menggunakan sistem pelaporan keuangan modern, akuntabilitas dalam pengelolaan dana adat *Tetulak Jebak* tetap terjaga melalui kombinasi antara nilai-nilai sosial budaya dan mekanisme komunikasi tradisional yang sudah mengakar kuat di dalam masyarakat.

Nilai saling percaya menjadi pondasi utama dalam sistem akuntabilitas adat yang sederhana. Banyak warga mengaku tidak pernah menanyakan secara rinci penggunaan dana karena meyakini panitia telah mengelolanya dengan baik. Kepercayaan ini tumbuh dari pengalaman kolektif bahwa setiap penyelenggaraan upacara adat selalu berjalan lancar tanpa adanya kecurigaan terhadap penyalahgunaan dana. Rasa percaya tersebut juga diperkuat oleh hubungan sosial yang erat antarwarga, di mana panitia dan masyarakat hidup dalam satu lingkungan yang saling mengenal dan mengawasi secara langsung.

Pengelolaan dana dalam suatu upacara adat penting diterapkannya pengawasan, pengawasan yang baik merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan tujuan kegiatan. Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana berjalan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan upacara adat, pengawasan menjadi semakin penting karena menyangkut dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan secara terbuka dan konsisten akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap panitia atau pengelola. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat dibutuhkan agar pelaksanaan upacara berjalan lancar tanpa menimbulkan kecurigaan atau ketidakpuasan. Selain itu, dengan adanya pengawasan, potensi penyalahgunaan dana atau pengeluaran yang tidak perlu dapat dicegah sejak dini, sehingga dana benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan. Bendahara upacara adat *Tetulak Jebak*, Bapak Haji Hasbullah menjelaskan bahwa mekanisme kontrol terhadap pengelolaan dana dilakukan secara kolektif. Pengawasan ini terutama dilaksanakan oleh ketua panitia bersama tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam struktur kepanitiaan. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung dan melekat pada setiap tahapan pelaksanaan upacara adat, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

Namun jika kontrol terhadap pengelolaan dana hanya dilakukan oleh panitia adat secara internal, maka tingkat kepercayaannya masih dapat dipertanyakan. Hal ini disebabkan oleh potensi adanya konflik kepentingan atau penilaian yang subjektif, terutama jika tidak ada keterlibatan langsung dari masyarakat dalam proses pengawasan tersebut. Oleh karena itu, kontrol yang ideal dan mencerminkan akuntabilitas yang baik seharusnya melibatkan partisipasi dari berbagai unsur, termasuk perwakilan masyarakat biasa yang bukan bagian dari struktur panitia adat. Bapak Haji Hasbullah melanjutkan narasinya,

“Yaaa mungkin ini karena sumbangan sukarela jadi masyarakat sudah mempercayakannya kepada kami semua sebagai pihak panitia”

Kehadiran perwakilan masyarakat dalam mekanisme kontrol tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membangun kepercayaan kolektif. Masyarakat akan merasa lebih dilibatkan dan dihargai, serta memiliki ruang untuk melihat secara langsung bagaimana dana dikelola, dibelanjakan, dan dipertanggungjawabkan. Melalui pengawasan yang terbuka dan partisipatif seperti ini, setiap keputusan yang berkaitan dengan keuangan akan lebih mudah dipertanggungjawabkan secara sosial, sekaligus mengurangi potensi kecurigaan dan konflik di kemudian hari, dengan demikian, kontrol yang melibatkan masyarakat luas merupakan cerminan nyata dari praktik akuntabilitas yang inklusif dan berkeadilan dalam pelaksanaan upacara adat. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Alvionita & Andriani (2023) yang menyatakan bahwa,

“Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan nagari telah dilaksanakan dengan baik, yang berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi”. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa sangat penting, dengan partisipasi ini transparansi meningkat dan pengelolaan dana menjadi lebih akuntabel, sehingga masyarakat merasa lebih percaya dan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan pada setiap panitia, tanggung jawab merupakan bagian terpenting dalam proses pengelolaan keuangan karena menjadi cerminan apakah seseorang atau sebuah pihak benar-benar menjalankan peran dan kewajibannya dengan serius. Tanpa rasa tanggung jawab, pekerjaan bisa asal-asalan, tujuan menjadi tidak tercapai, dan orang-orang yang seharusnya menerima manfaat bisa dirugikan. Tanggung jawab juga membuat seseorang lebih bisa dipercaya, karena dia tahu apa yang harus dilakukan dan siap menghadapi hasil dari tindakannya. Terlebih lagi menyangkut upacara adat di mana setiap peran dan tugas memiliki makna yang dalam serta harus dijalankan dengan penuh rasa hormat dan kehati-hatian. Kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab bisa berdampak tidak hanya pada jalannya acara, tapi juga pada nilai-nilai budaya yang dijaga turun-temurun.

Pada adat *Tetulak Jebak* Bapak Hairul Azmi menjelaskan bahwa panitia sudah menunjukkan tingkat tanggung jawab yang tinggi terhadap amanah yang dipercayakan masyarakat, tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan tetapi juga bertanggung jawab terhadap moral dan budaya untuk menjaga kelancaran serta kesakralan upacara adat. Beliau menambahkan narasinya,

“Kegagalan dalam pengelolaan dana bukan hanya sebuah kesalahan teknis saja, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan masyarakat”

Penelitian Pradnyarani (2024) menegaskan bahwa akuntabilitas dalam konteks adat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual sebagai bagian dari pengalaman hidup individu. Hal ini membuktikan bahwa panitia sudah menunjukkan sikap tanggung jawabnya dalam mempertanggungjawabkan perannya sebagai panitia, terutama dengan memberikan penjelasan secara terbuka dan mengakui pentingnya kepercayaan masyarakat dalam proses pengelolaan dana.

Tanggung jawab terlihat jelas dari sikap panitia yang mengelola dana secara serius, tidak hanya sebatas penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan budaya. Panitia menyadari bahwa kesalahan dalam pengelolaan dana tidak hanya akan menimbulkan kerugian materi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat dan mengurangi legitimasi mereka sebagai pengelola tradisi. Oleh karena itu, setiap tahapan mulai dari pengumpulan, pencatatan, hingga pelaporan dana dijalankan dengan penuh kehati-hatian.

Sikap ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dipandang bukan hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai amanah sosial yang berkaitan dengan kehormatan adat.

Tidak hanya tanggung jawab, responsivitas panitia menunjukkan bahwa panitia tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga peduli terhadap masukan dan kondisi yang berkembang di lapangan. Sikap tanggap terhadap situasi menunjukkan adanya komunikasi dua arah yang sehat antara panitia dan masyarakat.

Bapak Hairul Azmi menyampaikan responsivitas panitia terlihat dari sikap terbuka terhadap setiap kritik dan saran dari masyarakat, setiap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan upacara adat selalu ditampung dan langsung direspon dalam forum terbuka maupun secara spontan saat upacara berlangsung. Responsivitas panitia tidak hanya tercermin dari pelaksanaan tugas teknis, tetapi juga dari keterbukaan terhadap kritik, saran, dan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Situngkir (2015) yang menunjukkan bahwa kegiatan adat di Indonesia dibangun atas dasar keterlibatan aktif masyarakat. Dalam konteks ini, panitia tidak hanya bertindak sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai pihak yang responsif terhadap kondisi sosial dan harapan komunitas, dengan membuka ruang komunikasi dan partisipasi dalam setiap proses kegiatan, ini menunjukkan bahwa kegiatan berbasis tradisi seperti nyumbang memungkinkan hubungan dua arah antara panitia dan masyarakat sebagai bentuk solidaritas dan akuntabilitas sosial.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas dalam pengelolaan dana upacara adat *Tetulak Jebak* di Desa Pringgabaya telah berlangsung dengan mengacu pada nilai-nilai budaya lokal, seperti musyawarah, gotong royong, kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Mekanisme tradisional ini cukup efektif menjaga keberlangsungan upacara adat dan membangun kepercayaan masyarakat. Namun, dari perspektif akuntabilitas modern, praktik transparansi dalam penyampaian informasi dana masih menghadapi tantangan. Sebagian masyarakat merasa cukup dengan sistem yang ada, sementara sebagian lainnya mengharapkan penyebaran informasi yang lebih terbuka dan merata. Dengan demikian, praktik akuntabilitas yang berjalan saat ini dapat dipahami sebagai bentuk keseimbangan antara nilai tradisional yang sudah mengakar dan tuntutan modernisasi yang mulai muncul di masyarakat.

Untuk meningkatkan praktik akuntabilitas dalam pengelolaan dana upacara adat *Tetulak Jebak*, diperlukan upaya memperluas penyebaran informasi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat melalui papan pengumuman desa, atau media sosial komunitas, sehingga setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui laporan dana. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga sebaiknya diperluas dengan melibatkan perwakilan warga di luar struktur panitia agar transparansi semakin terjaga dan menumbuhkan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Faculty, R. (2017). The Relationship Between The Use of a Performance Measurement System, Organizat Factors, Accountability, and the Performace of Public Sector Organization. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31(September 2016), 1.
- Alvionita, & Andriani, W. (2023). Analisis Akuntabilitas, Transparansi , dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Nagari. *Accounting Information System, Taxes, and Auditing*, 2(2), 64–78.
- Andriani, K. E., & Atmaja, A. T. (2022). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Peturunan dalam Kegiatan Piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, Vol. 12(No. 1), 91–98.

- Aryawati, S. (2022). Dana Pania Sebagai Sumbangam Keagamaan Umat Hindu Lombok Dari Sisi Akuntansi. *Jurnal Manajemen*, 1(1), 35–43.
- Borb, N. (2024). Theory and Practice . Ethnographic Approaches to Cultural Heritage and an Empirical Example from Western Ukraine. *Acta Ethnographica Hungarica*, 68(2023), 525–567.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework1. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Brahmanda, Y. (2024). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Ngaben , Tiga Bulanan , dan Metatah di Desa Adat Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. 14(1), 78–86.
- Dewi, Kadek, R., & Musimin, Lucy, S. (2020). Mengungkap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Upacara Ngusabha Nini yang Dilandasi Dresta Desa Adat Tegenan. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 2686–2468.
- Ellwood, S. (1993). Parish and town councils: Financial accountability and management. *Local Government Studies*, 19(3), 368–386.
- Fantazilu, Danial, D. (2023). Gambaran Budaya Generasi Milenial Di Kota Surabaya Ditinjau Dari Enam Dimensi Budaya Hofstede. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 171–180.
- Fiandi, A. (2023). Analisis Akuntabilitas Lembaga Pendidikan Kontemporer. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1(4).
- Fitri, F. (2022). Nilai-nilai sila Persatuan Indonesia Dalam keberagaman Kebudayaan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 1.
- Gamaliel, H. (2025). Analysis of transparency and accountability in financial management (Case study at Don Bosco Foundation Manado). *The Contrarian: Finance, Accounting, and Business Research*, 4(1), 19–28.
- Hasym, M., & Pratama, O. G. P. (2014). Pelestarian Tradisi Uang Jimpitan di Lingkungan Dusun Ggepuh Lor, Desa Banyusidi, Pakis, Magelang, Jawa Tengah. *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, 3(3), 151–154.
- Kumalawati, N. N. D. D., & Atmadja, A. T. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Iuran Dana Patis. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11(2), 77–88.
- Linda, A. &. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus Bumdes Ina Huk). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72.
- LoisChoFeer, A. J., & Darmawan, D. R. (2021). Tradisi Tolak Bala Sebagai Adaptasi Masyarakat Dayak Desa Umin Dalam Menghadapi Pandemi Di Kabupaten Sintang. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 5(1), 53. <https://doi.org/10.20961/habitus.v5i1.53723>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terb). Andi. https://books.google.com/books/about/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Edisi_Terbaru.html

- Mijianti, Y., & Dewi, E. (2022). Makna Simbolik Makanan Khas Bakalan : Studi Etnografi. *Jurnal Ilmiah Bahasa & Sastra Indonesia*, 7(1), 15–24.
- Muslim. (2024). Audit Dana Adat Upacara Rambu Solo. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(January 2023), 916–924.
- Oktavia, I., & Mustika, R. (2025). Kampung Adat Dalam Potret Akuntabilitas : Suatu Kajian Etnografi. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 11, 378–386.
- Pahlevi, Susilowati, & Widoretno, A. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa Marhaendra. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1480–1486.
- Pradnyarani, Sudarma, Djamhuri, & Andayani, W. (2024). Cultural Perspectives on Financial Accountability in a Balinese Traditional Village.
- Purwohedi, U., & Hasanah, N. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba. September 2013.
- Rashdi, & Dick, Martin, I. (2015). Achieving Accountability in Cloud Computing A Conceptual Framework for Accountability in Cloud Computing Service Provision. Pearson 2013.
- Situngkir, P. (2015). On Social and Economic Spheres : An Observation of the “ gantangan ” Indonesian tradition. 1–6.
- Sriwinarti&Sokarina. (2023). Memaknai hak akuntabilitas dari dimensi kewajiban dana piodalan. *Jurnal Akuntansi Ekonomi*, 1–10. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i1.19372>
- Sujana, Sari, & ... (2020). Study Of Folklor Ceremony Of Ari-Ari In Bali Aga And Non Bali Aga As A Local Culture Of The Lind. *Jurnal Ilmu Sosial*, 3(2), 326–340.
- Syahril, H. (2019). Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa (Desa Ketupat Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep). *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*, 07(02), 1–13.
- Tari Indaryani, & Ayudia Sokarina. (2024). Accounting of Bugis Tribe Marriages in Labuhan Lombok Village: Ethnographic Study. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(3), 313–332.
- Turyani, Erni, H. (2024). Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2).
- Widya, Syarifuddin, H. (2022). Makna Ritual Tetulak Desa Bagi Masyarakat Desa Peringgabaya. *Ilmu Sosiologi*, 10(1), 1–52.